

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
DIPA BLU FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**Analisis Penanganan Urusan Publik oleh Masyarakat dan
Pemerintah: Studi Kasus Banjir di Desa Haji Mena, Kabupaten
Lampung Selatan**

Tim Pengusul

Dr. Syarief Makhya (Ketua)
(NIDN. 0020076106/ ID SINTA 6045889)

Dr. Feni Rosalia, M.Si (Anggota)
(NIDN. 0019026901/ ID SINTA 6039509)

Dr. Pitojo Budiono, M.Si (Anggota)
(NIDN. 0008056401/ ID SINTA 6014322)

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP (Anggota)
(NIDN. 0030047805/ ID SINTA 6089500)

**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Analisis Penanganan Urusan Publik Oleh Masyarakat dan Pemerintah : Studi Kasus Masalah Banjir di Desa Haji Mena, Kabupaten Lampung Selatan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Syarief Makhya
b. NIDN : 0020076106
c. SINTA ID : 6045889
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
f. Nomor HP : 0813 68245409
g. Alamat surel (e-mail) : syarief.makhya@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Feni Rosalia, M.Si
b. SINTA ID : 6039509
c. Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr. Pitojo Budiono, M.Si
b. SINTA ID : 6014322
c. Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
b. SINTA ID : 6089500
c. Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Nama mahasiswa yang terlibat

a. Nama Lengkap : Asa Syifatunnisa
b. NPM : 2326021017

Jumlah alumni yang terlibat : 2 (dua) alumni

Jumlah staf yang terlibat : 1 (satu) staf

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung

Lama kegiatan : 3 (tiga) bulan

Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

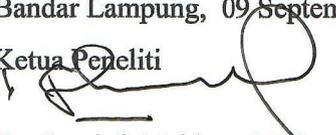
Sumber dana : DIPA FISIP Universitas Lampung Tahun Anggaran 2024

Bandar Lampung, 09 September 2024

Wakil Dekan I FISIP


Dr. Dedi Hermawan, M.Si.
NIP. 197507202003121001

Ketua Peneliti


Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP. 195908031986031003

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila


Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, ST., MT. IPM. ASEAN Eng.
NIP. 197204281998032001

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Abstrak	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Urgensi Penelitian.....	5
BAB II STUDI PUSTAKA.....	6
2.1 State of The Art Penelitian	6
2.2 Konsep Dasar Penelitian	8
2.2.1 Banjir.....	8
2.2.2 Kapasitas Pemerintah Daerah.....	9
2.3 Pemerintahan Antisipatif.....	10
2.4 Peta Jalan Penelitian	12
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Metode Penelitian	13
3,2 Fokus Penelitian	14
3.3 Analisis Data	15
3.4 Lokasi Penelitian	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan.....	17
4.2 TuGas dan Fungsi BPBD.....	19
4.3 Banjir di Kabupaten Lampung Selatan.....	24
4.4 Peran Pemrintah Kab Lampung Selatan	26
4.5 Kapasitas Pemerintah	31
4.6 Analisis Banjir dan Kelembagaaan Pemerintah.....	35

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	44
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Rekomendasi	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Banjir di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 24.....	12
Tabel 2 Model Pemerintahan Dalam Penanganan Banjir.....	34
Tabel 3 Model Pemerintahan	43

MODEL PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGANAN BANJIR: STUDI KASUS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi untuk mengetahui karakteristik model pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan dalam menangani persoalan banjir. Dari kasus banjir yang terjadi di tahun 2023, diteliti bagaimana Pemkab Lampung Selatan apakah memiliki model pemerintahan yang responsif dan bisa beradaptasi dengan penanganan masalah banjir? bagaimana aspek kelembagaan pemerintah dalam mengatasi masalah banjir. Masalah

Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran yang mendalam dan detail tentang fenomena yang diteliti yaitu karakteristik model pemerintahan. Metode ini lebih menekankan pada pemahaman konteks dan makna dari suatu fenomena.

Sumber Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini biasanya bersifat kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Sumber data ini dipilih untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendetail. Analisis data dalam metode deskriptif kualitatif bersifat induktif, yaitu peneliti mencari pola, tema, atau kategori dari data yang dikumpulkan. Proses ini biasanya melibatkan pengkodean data, mencari hubungan antar kategori, dan menyusun temuan secara naratif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam penanganan masalah banjir di Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah belum bisa dikategorikan pemerintahan yang bersifat responsif, adaptif dan antisipatif karena untuk mengatasi masalah banjir dari aspek kelembagaan pemerintahan masih terpusat di BPBD Kabupaten Lampung Selatan, yang aksesnya dalam penanganan lokasi banjir sangat terbatas. Sementara peran pemerintah desa, kendati cukup responsif dan cepat, perannya sangat terbatas hanya pada pemantauan dan pelaporan kepada pihak berwenang. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak menunjukkan adaptasi yang memadai terhadap penanganan banjir, dan pemerintah juga kurang antisipatif terhadap perubahan cuaca ekstrem serta dampak lingkungan yang dapat memperburuk situasi banjir.

Kata Kunci : banjir, pemerintahan adaptif, pemerintahan antisipatif,

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu urusan publik yang seringkali menjadi masalah saat musim hujan yaitu banjir, yang tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa. Banjir sering kali disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, mulai dari kurangnya kapasitas drainase, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, hingga perubahan cuaca ekstrem yang dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Menanggapi hal ini, diperlukan respons yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta peningkatan infrastruktur dapat membantu mengurangi dampak banjir yang sering terjadi di banyak wilayah

Banjir di Kabupaten Lampung Selatan adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam perspektif pemerintah menganalisis dan mengatasi masalah banjir di Kabupaten Lampung Selatan memerlukan pendekatan dengan menggunakan model pemerintahan, apakah dengan model pemerintahan yang birokrasi yang tidak fleksibel dan tidak ada pendelegasian kewenangan kepada pemerintah desa, persoalan banjir bisa diantisipasi dan ditangani secara efektif.

Asumsi dalam penelitian ini bahwa untuk bisa mengatasi berbagai masalah-tidak pastian antara lain masalah banjir dibutuhkan pemerintah yang memiliki kapasitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Kapasitas tersebut bisa di lihat dari fleksibilitas, adaptasi dan antisipasi Tindakan pemerintahan dalam mengatasi banjir. Dewasa ini muncul persoalan tidak pastian zantara lain muncul banjir yang sulit dipresiksi . Oleh karena itu perlu diatasi dengan pendekatan adanya manajemen perubahan dalam tata keloa pemerintahan .

Di sisi yang lain, pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut dihadapkan pada keterbatasan masalah anggaran, sumberdaya manusia, manajemen pemerintahan dan dan keterbatadsan dari aspek kapasitas pemerintahan.

Sementara model pemerintahan yang dikembangkan masih bersifat tradisional yang ciri khasnya struktur yang vertikal, birokrasi yang kental dan wataknya yang interventions. Model pemerintahan (tradisional) seperti ini temyata tidak mampu mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan ekonomi, sosial dan kultural yang sedang mengalami perubahan yang cepat. Oleh sebab itu, dibutuhkan model pemerintah yang benar-benar mampu memerintah (*capable government*)(Wahab, 2000).

Latar belakang penelitian ini juga didasari bahwa ada kompleksitas Isu Kebijakan Publik yaitu Isu-isu kebijakan publik dan pelayanan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pemerintahan desa menjadi semakin kompleks seiring dengan terjadinya perubahan lingkungan seperti kepadatan penduduk, terjadinya banjir, dsb.

Perubahan Lingkungan: Lingkungan dan sosial, ekonomi, yang berubah cepat membutuhkan adaptasi yang cepat dari model pemerintahan tradisional ke model yang lebih dinamis dan fleksibe. Selain hal tersebut pentingnya Kepuasan Masyarakat: Kepuasan masyarakat adalah indikator penting dari efektivitas pemerintah

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana model pemerintahan bisa efektif dalam menangani masalah banjir? Problem dasar apa yang menjadi persoalan pokok keterbatasan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menangani masalah banjir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Desa Haji Mena akan dihadapkan pada dinamika perkembangan masalah banjir yang semakin kompleks, sementara pemerintah sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menawarkan konsep yang tepat tentang pilihan model pemerintahan daerah yang sesuai dengan konteks dinamika perubahan yang terjadi dan bisa menjawab khususnya masalah banjir.

Secara demikian, tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi perkembangan masalah banjir dalam tiga tahun terakhir ini di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memecahkan masalah banjir, dilihat dari pendekatan model pemerintahan
3. Menyusun rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah banjir yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian pengembangan model pemerintahan perlu dilakukan karena adanya kompleksitas masalah banjir yang harus bisa dipecahkan secara efektif oleh pemerintah. Salah satu persoalan dasar yang dihadapi oleh pemerintah daerah Lampung Selatan yaitu belum ada evaluasi tentang kecederungan model pemerintahan, apakah bisa dikategorikan pemerintah daerah sekarang responsif, adaptif, dan antisipatif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi saat ini. banjir.

Berdasarkan alasan tersebut maka urgensi penelitian ini adalah (1) mengembangkan model pemerintahan Kabupaten yang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah publik khususnya masalah banjir; (2) Menyusun rekomendasi kebijakan sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memecahkan masalah banjir.

BAB II. STUDI PUSTAKA

2.1 State Of The Art

State of the art penelitian ini, fokus pada literatur dan praktek terkini dalam tiga area utama: manajemen sumber daya oleh pemerintah lokal, pengidentifikasian dan penanganan isu-isu urusan publik yang emergen, serta evaluasi dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah publik, khususnya dalam konteks pengelolaan bencana banjir. Kajian pada setiap area adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Sumber Daya oleh Pemerintah Lokal

Penelitian terkini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya oleh pemerintah. Studi oleh UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) menekankan penerapan pendekatan yang berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya untuk mitigasi bencana, menyarankan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan dapat meningkatkan efektivitas manajemen bencana.

2. Pengidentifikasian dan Penanganan Isu-isu Urusan Publik yang Emergen

Literatur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa identifikasi cepat dan respons terhadap isu-isu publik yang emergen merupakan kunci dalam mengurangi dampak negatif dari bencana alam seperti banjir. Studi kasus dari berbagai lokasi di dunia menyoroti pentingnya sistem peringatan dini yang terintegrasi dan kebijakan adaptasi iklim yang efektif sebagai bagian dari pengelolaan risiko bencana.

3. Evaluasi Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Publik

Evaluasi dari kebijakan dan intervensi pemerintah sering menemukan bahwa kerjasama antar sektoral dan inklusi stakeholders lokal merupakan faktor penting dalam suksesnya inisiatif publik. Penelitian oleh organisasi seperti World Bank dan OECD menunjukkan bahwa pendekatan yang kolaboratif dan yang mempertimbangkan kearifan lokal biasanya lebih berhasil dalam mencapai solusi berkelanjutan dan efektif terhadap masalah publik, khususnya dalam konteks pengelolaan bencana.

Integrasi Teknologi dan Inovasi dalam Penanganan Banjir

Penelitian terbaru juga menunjukkan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan bencana. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis smart phone untuk melaporkan situasi bencana secara real-time atau penggunaan big data dan AI untuk memprediksi pola banjir, yang dapat membantu dalam perencanaan lebih efektif dan alokasi sumber daya yang lebih tepat.

Dari *state of the art* tersebut di atas ini, jelas bahwa penanganan isu urusan publik seperti banjir memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan kebijakannya tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Efektivitas pengelolaan bencana sangat bergantung pada integrasi sumber daya, identifikasi dini masalah, dan kerjasama antar semua stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan praktik-praktik ini dalam konteks Desa Haji Mena untuk memberikan wawasan yang bisa digeneralisasi ke konteks yang lebih luas.

2.2 Konsep Dasar Penelitian

2.2.1 Banjir

Banjir adalah kejadian alam atau antropogenik yang terjadi ketika air meluap dan menutupi lahan yang biasanya kering. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), banjir dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk curah hujan yang berlebihan, pelepasan air bendungan, atau pencairan salju yang cepat, dan sering kali diperparah oleh kemampuan drainase yang tidak memadai di area urban atau perubahan penggunaan lahan. Banjir dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, termasuk banjir sungai, banjir permukaan, dan banjir bandang, masing-masing dengan karakteristik dan penyebab yang berbeda.

Sementara bencana diartikan peristiwa serius yang mengakibatkan gangguan pada fungsi masyarakat, menyebabkan kerugian manusia, material, ekonomi, atau lingkungan yang luas, yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena untuk mengatasi menggunakan sumber daya sendiri. Definisi ini berasal dari Strategi Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana (UNISDR). Bencana bisa berupa alam atau buatan manusia dan termasuk peristiwa seperti gempa bumi, tsunami, badai, dan banjir.

Definisi ini menggarisbawahi bahwa banjir adalah salah satu bentuk bencana alam yang sering terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan dan infrastruktur. Dalam konteks kebijakan publik dan manajemen bencana, pemahaman yang jelas tentang istilah ini penting untuk perencanaan, mitigasi, dan tanggap darurat yang efektif.

2.2.2 Kapasitas Pemerintah Daerah

Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa merujuk pada kemampuan pemerintah di tingkat lokal untuk efektif mengelola sumber daya, mengimplementasikan kebijakan, dan merespon kebutuhan publik dalam cara yang efisien dan efektif. Konsep ini mencakup berbagai dimensi seperti kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, teknologi, serta kemampuan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dimensi Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa:

1. **Kapasitas Kelembagaan:** Struktur organisasi, regulasi, dan prosedur yang memungkinkan pemerintah daerah dan desa untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka secara efektif.
2. **Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk pendidikan, pelatihan, dan pengalaman para pegawai pemerintahan.
3. **Kapasitas Keuangan:** Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, termasuk anggaran, pendanaan, dan penggunaan dana dengan efisien.
4. **Kapasitas Teknologi:** Akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional dan layanan publik.
5. **Kapasitas Kerjasama:** Kemampuan untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola isu-isu publik.

.3.3 Pemerintahan Antisipatif

Pemerintahan antisipatif adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yaitu perspektif baru pemerintahan yang dikenal dengan prinsip pemerintahan antisipatif (*anticipatory government*) yaitu “*prevention rather than cure*” yang memiliki daya antisipatif, harus bertindak mencegah masalah daripada sekedar menanggulangi masalah. Pemerintahan antisipatif dimaksudkan untuk menghindari atau meminimalkan resiko. Pemerintahan antisipatif merupakan reaksi/tanggap terhadap sesuatu yang sedang/akan terjadi. Artinya bagaimana melihat suatu permasalahan/tantangan, hambatan yang terjadi di masa lalu, sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi dengan melakukan perencanaan sesuai misi/visi organisasi.

Antisipasi adalah upaya pencegahan daripada mengobati. Mencegah daripada mengobati akan membawa organisasi kepada tingkat yang lebih efisien dan efektif dan sekaligus dapat memberikan kepuasan/perlindungan (Syarifudin, 2002). Menurut Osborne dan Gaebler (1992) Pemerintahan antisipatif adalah pemerintahan yang berpikir ke depan. Mereka mencoba mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.

Memiliki daya tanggap (*responsiveness*) adalah tindakan aparaturnya pemerintahan yang secara cepat menanggapi dan mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah. Secara nyata kegiatan tersebut antara lain dapat berupa penyediaan penyediaan pusat layanan pengaduan masyarakat, pusat layanan masyarakat (*crisis center*), kotak surat

saran/pengaduan, tanggapan surat pembaca, website, forum pertemuan publik dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu menghadapi berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi. Dalam situasi seperti ini, aparat pemerintah tidak sepatutnya memiliki sifat “masa bodoh”, tetapi harus cepat tanggap dengan mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Di Indonesia gagasan membangun pemerintahan antisipatif belum menjadi kebutuhan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan. Cara kerja pemerintah masih bersifat reaktif dan inkremental (tambal sulam) sehingga dinamika perubahan ke depan tidak bisa diintervensi melalui sebuah perencanaan kebijakan yang sistematis. Konsep pemerintahan antisipatif mengasumsikan bahwa akan terjadi perubahan yang diakibatkan oleh faktor ketidakpastian atau adanya faktor perubahan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, akan ada dinamika pemerintahan yaitu "kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Dalam konsep tersebut perubahan merupakan esensi dasar dalam dynamic governance. Dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dinamika perubahan lingkungan diperlukan berbagai perubahan baik dari aspek rencana maupun implementasinya" (Syafri, 2011). *Dalam konsep Boon dan Geraldine (2007: Dynamic Governance sebagai “to how these chosen paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing environment so that they remain relevant and efektif in achieving the long-term desired outcomes of society”*

2.4 Peta Jalan Penelitian

Hasil penelitian Syarief Makhya, dkk tentang IRDA (Indonesian Rapid Decentralization Appraisal) yang dilakukan selama empat tahun (2004-,2007,) di Kota Metro, menunjukkan bahwa desentralisasi ternyata hampir tidak membawa perubahan terhadap proses pembuatan kebijakan yang lebih partisipatif. Pendekatan dari atas ke bawah (top-down approach) masih menjadi norma yang berlaku, namun sudah mulai dilakukan beberapa pembaharuan dengan melibatkan *civil society organization* dalam proses pengambilan kebijakan. Juga, sudah ada upaya untuk melakukan mekanisme konsultasi dengan masyarakat mengenai berbagai kebutuhan dan aspirasi publik, walaupun fenomena konsultasi tersebut masih melibatkan kalangan yang sangat terbatas.

Hasil penelitian tentang Kepuasan Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara yang dilakukan Syarief Makhya, dkk (2007, 2009), menunjukkan bahwa Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Lamsel, dinilai masih belum memuaskan yang bersumber pada persoalan pelayanan yang berbelit-belit, mahal, sulit dijangkau, tidak merata, petugas yang tidak responsif. Demikian halnya, Pemda Lamsel masih rendah dalam merespon isu pokok yang mendasar seperti masalah kemiskinan, kerusakan infrastruktur (jalan, penyediaan terminal, pelabuhan, dsb), isu lingkungan, isu fasilitas umum, dan pemberantasan korupsi.

Hasil Penelitian Syarief Makhya (2010) tentang Model Alternatif Otonomi Daerah Dalam Membangun Hubungan Pemerintah Pusat-Provinsi Dan Kabupaten/Kota Studi Di Provinsi Lampung, menyimpulkan yaitu model penyelenggaraan pemerintahan yang masih berpegang pada model hirarkis, implementasi kebijakan yang terbatas, kontrol dari pemerintah, keteraturan hubungan kewenangan, tertib dan stabilitas pemerintahan yang terjaga, keutuhan NKRI, dan homogenitas regulasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa derajat otonomi daerah masih rendah, pemda masih memiliki keterbatasan dalam mengatasi masalah-masalah pelayanan publik, dan model pemerintahan masih bersifat tradisional. Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut, maka perlu dikaji lebih jauh tentang kecenderungan model pemerintahan yang memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi dua pendekatan utama untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai penanganan masalah banjir oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan . Pendekatan yang diadopsi adalah sebagai berikut:

1. **Wawancara mendalam.** Metode ini melibatkan sesi wawancara yang terstruktur dan terfokus dengan para stakeholder kunci yang terlibat dalam manajemen dan respons terhadap banjir. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, Pemerintah Desa Haji Mena, RT, Kepala Dusun, dan pihak-pihak yang terkait.
2. **Dokumentasi dan Observasi.** Data dan informasi juga akan dikumpulkan melalui dokumentasi resmi dan personal dari instansi-instansi terkait. Ini termasuk laporan kegiatan, rencana kerja, dan dokumentasi proyek yang berkaitan dengan banjir. Observasi langsung di lokasi yang terdampak banjir dengan mengambil sampel pengamatan di Desa Haji Mena akan dilakukan untuk memahami kondisi aktual di lapangan, termasuk respons dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Sumber Data:

- **Data Primer,** Data ini akan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan seperti aparat pemerintah desa, kepala dusun BPB Lamsel, dan beberapa instansi terkait.

- **Data Sekunder,** Informasi tambahan akan diperoleh dari publikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, website, dan pemeritaan di media sosial.

Penggunaan kombinasi kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan multidimensi terhadap dinamika dan solusi dalam penanganan masalah banjir di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola bencana alam di masa depan.

4.2 Fokus Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami interaksi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dan mengelola masalah banjir di Desa Haji Mena, Lampung Selatan, dengan perhatian khusus pada:

1. Deskripsi Sumber Daya Pemerintah Kab Lampung Selatan dalam menentukan dalam kapasitas yang ada dan keterbatasan dalam menghadapi bencana banjir.
2. Identifikasi Isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan bencana banjir. Penelitian ini akan mencari tahu isu-isu prioritas yang berdampak pada respons dan kebijakan terhadap banjir.
3. Evaluasi Upaya Pemerintah Kabupaten Lamsel yaitu : Menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Lampung Selatan dalam mengatasi masalah-masalah urusan publik, terutama banjir. Analisis ini akan meliputi kebijakan publik yang diadopsi, efektivitas institusi yang terlibat, dan struktur organisasi yang mendukung. Evaluasi ini akan mencakup keberhasilan dan

kegagalan yang dialami dalam mengimplementasikan strategi dan intervensi untuk mengelola banjir.

4.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan analisis masalah di lapangan. Analisis data mengikuti anjuran Bogdan dan Bilken (1990) yang mencakup kegiatan-kegiatan menelaah data, membaginya dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisiskannya, mencari pola, menemukan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan.

Analisis data tersebut akan mengungkap : (a) data apa yang perlu dicari; (b) hipotesis apa yang perlu dites; (c) pertanyaan apa yang perlu dijawab; (d) metode apa yang harus dipakai untuk mencari informasi baru; dan (e) kesalahan apa yang harus diperbaiki (Nasoetion, 1988:30)

Proses analisis data dilakukan melalui prosedur : (a) penelaahan data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data; (b) data yang sudah terkumpul direduksi sehingga tersusun secara sistematis; (c) data yang sudah tersusun dibuat kategorisasi (d) satuan data yang sudah dikategorisasi diberi kode tertentu; (e) dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh keabsahan data melalui pengamatan yang lebih teliti, triangulasi dengan sumber data, teori dan metode penelitian, mendiskusikan hasil sementara dengan sejawat, menganalisis kasus negatif dan (f) melakukan penafsiran data (Meleong, 1990:198),

Untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian dilakukan kredibilitas data (internal validity) transferabilitas (*external validity*), dependabilitas (*reliability*) dan konfirmabilitas (*objectivity*) (Nasoetion, 1998), Maleong, 1990).

4.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sampel di Desa Haji Mena Kabupaten Lampung Selatan. Alasan dipilihnya lokasi ini karena setiap tahun di Desa Haji Mena sering dilanda banjir saat musim hujan yang penanganannya cenderung kurang efektif. Selain Desa Haji Mena, juga akan dilakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu BPBD Lamsel, kepala desa dan aparat desa, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat .

Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan		
		Bulan Ke I dan II	Bulan Ke III dan IV	Bulan Ke V dan VIII
1	Penyusunan Proposal	v		
2	Penelitian Lapangan	v	v	
3	Analisis Data		v	
4	Penyusunan Laporan		v	v
5	Seminar Hasil Riset			v
6	Publikasi Ilmiah			v

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan adalah sebuah daerah administratif di Provinsi Lampung, Sumatra, Indonesia. Berikut adalah gambaran umum mengenai kabupaten ini:

Geografi

- Lokasi: Terletak di bagian selatan Provinsi Lampung, berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Way Kanan di sebelah utara.
- Luas Wilayah: Sekitar 3.568,80 km².
- Topografi: Kabupaten ini memiliki beragam kondisi geografis, termasuk pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Bagian selatan kabupaten ini memiliki garis pantai yang panjang dan berbatasan langsung dengan lautan.

Iklim

- Iklim: Memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan November hingga Maret, sementara musim kemarau berlangsung dari April hingga Oktober.

Pemerintahan

- Kepala Daerah: Dipimpin oleh seorang Bupati yang dipilih melalui pemilihan umum.
- Pembagian Administratif: Kabupaten ini terbagi dalam beberapa kecamatan dan desa/kelurahan.

Ekonomi

- Sektor Utama: Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan didorong oleh sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Tanaman utama yang dibudidayakan di daerah ini termasuk kelapa sawit, karet, dan kopi. Selain itu, sektor perikanan juga memainkan peran penting, terutama di daerah pesisir.
- Pariwisata: Kabupaten ini memiliki potensi wisata alam yang cukup besar, seperti pantai, air terjun, dan taman nasional. Destinasi wisata seperti Pantai Kiluan dan Taman Nasional Way Kambas adalah beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi.

Demografi

- Penduduk: Beragam suku dan etnis mendiami daerah ini, dengan mayoritas penduduknya adalah suku Lampung. Bahasa Lampung dan Bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang digunakan sehari-hari.
- Budaya: Kabupaten ini kaya akan budaya dan tradisi lokal, dengan berbagai festival dan upacara adat yang dilaksanakan sepanjang tahun.

Infrastruktur

- Transportasi: Daya jangkau kabupaten ini terhubung dengan jalur transportasi darat yang menghubungkan dengan kota-kota besar di sekitarnya, seperti Bandar Lampung. Akses transportasi laut juga tersedia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir.

Tantangan

- Pengelolaan Sumber Daya: Seperti banyak daerah lainnya, Kabupaten Lampung Selatan menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi dan pariwisata, serta kekayaan budaya yang patut dilestarikan.

4.2 Tugas dan Fungsi BPBD Lampung Selatan

Dalam struktur pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kedudukan yang strategis. BPBD adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten.

Kedudukan BPBD dalam Struktur Pemerintahan Daerah yaitu **sebagai** Organisasi Pemerintah Daerah. BPBD merupakan salah satu Badan (Organisasi Perangkat Daerah) di bawah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan.

BPBD langsung berada di bawah koordinasi Bupati sebagai kepala daerah. Bupati memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan keputusan strategis terkait penanggulangan bencana, dan BPBD bertugas untuk melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan. BPBD bekerja sama dengan Sekretariat Daerah (Setda) dalam hal administrasi dan koordinasi. Setda bertugas memberikan dukungan administratif dan koordinasi antar-Badan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas, BPBD berkoordinasi dengan berbagai Dinas dan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan penanggulangan bencana yang efektif dan integratif.

BPBD juga berkolaborasi dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta dalam kegiatan penanggulangan bencana. Hal ini termasuk penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan tanggap darurat.

Struktur Organisasi BPBD

Secara umum, struktur organisasi BPBD Kabupaten Lampung Selatan dapat mencakup beberapa bagian atau unit sebagai berikut:

1. Kepala BPBD:

- Memimpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas BPBD, serta bertindak sebagai juru bicara dalam hal kebijakan dan kegiatan penanggulangan bencana.

2. Sekretariat BPBD:

- Menangani administrasi dan koordinasi internal BPBD serta hubungan dengan instansi lain dan masyarakat.

3. Bidang Operasional dan Penanggulangan Bencana:

- Bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana, termasuk tim tanggap darurat dan respon bencana.

4. Bidang Pencegahan dan Mitigasi:

- Fokus pada kegiatan pencegahan, mitigasi risiko bencana, dan penyuluhan kepada masyarakat.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

- Mengelola proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana untuk pemulihan dan perbaikan.

6. Unit Logistik dan Peralatan:

- Mengelola dan menyediakan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Kedudukan dan struktur BPBD dalam pemerintahan daerah memungkinkan lembaga ini menjalankan tugasnya dengan efektif dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

Tugas dan Fungsi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menghadapi dan mengelola bencana di daerah tersebut. Berikut adalah tugas dan fungsi BPBD Lampung Selatan secara umum:

Tugas BPBD Kabupaten Lampung Selatan

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana:
 - Menyusun dan merencanakan program serta kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan potensi bencana di daerah.
2. Koordinasi Penanggulangan Bencana:
 - Mengkoordinasikan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta dalam upaya penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana:
 - Mengorganisasi dan melaksanakan operasi penanggulangan bencana pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak dan risiko terhadap masyarakat.
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana:

- Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana, seperti alat-alat evakuasi, perlengkapan pertolongan pertama, dan fasilitas penyimpanan bantuan.
5. Pelatihan dan Pendidikan:
- Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat dan petugas penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan dalam menghadapi bencana.
6. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi:
- Mengumpulkan data dan informasi terkait bencana, termasuk risiko, dampak, dan potensi bencana, serta menyebarkannya kepada masyarakat dan pihak terkait.
7. Pengelolaan Dana dan Bantuan:
- Mengelola dana penanggulangan bencana serta distribusi bantuan kepada korban bencana secara efektif dan tepat waktu.
8. Pemulihan dan Rehabilitasi:
- Mengkoordinasikan kegiatan pemulihan dan rehabilitasi pasca-bencana untuk membantu masyarakat kembali ke keadaan normal, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi.

Fungsi BPBD Kabupaten Lampung Selatan

1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana:
- Melakukan upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, seperti penyuluhan tentang bahaya bencana dan pengembangan sistem peringatan dini.
2. Kesiapsiagaan:

- Menyusun dan melaksanakan rencana kesiapsiagaan bencana, termasuk pengaturan evakuasi, pembentukan tim tanggap darurat, dan penyediaan peralatan darurat.
3. Respon Darurat:
- Mengkoordinasikan respons cepat terhadap bencana untuk meminimalkan dampak dan membantu korban, serta mengatur distribusi bantuan darurat.
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
- Mengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi pasca-bencana, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemulihan sosial-ekonomi.
5. Advokasi dan Kerja Sama:
- Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam penanggulangan bencana, serta melakukan advokasi untuk peningkatan kesadaran bencana.

BPBD Kabupaten Lampung Selatan berperan penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai tugas dan fungsi tersebut. Keberhasilan dalam penanggulangan bencana sangat bergantung pada koordinasi yang baik, kesiapsiagaan, dan respons cepat terhadap situasi darurat.

4.3 Banjir di Kabupaten Lampung Selatan

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, sebuah daerah yang terletak di bagian selatan Provinsi Lampung, Lokasi geografi yang bervariasi, dari dataran rendah hingga wilayah pesisir, serta curah hujan yang cukup tinggi, banjir menjadi isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan di daerah ini.

Banjir di Kabupaten Lampung Selatan (lihat data tabel 1)

Tabel. 1 Banjir di Kabupaten Lampung Selatan Januari-Juli 2024

No	Lokasi	Akibat Bencana
1	Dusun 1 Jembat Besi Desa Gunung Terang Kecamatan Kalianda	1 orang luka ringan, , 2 rumah terendam
2	Lingkungan 3 Kel Waylubuk, Kec Kalianda	Jembatan Putus, dan 3 rumah tergenang air
3	Desa Haji Mena dan Desa Sidosari, Kecamatan Natar	883 rumah terendam
4	Desa Sukapura Kecamatan Sragi	27 rumah tergenang
5	Desa Haji Mena, dan Desa Sidosari, Kecamatan Natar	<ul style="list-style-type: none"> • 569 rumah dan Puskesmas Terendam • 10 rumah rusak sedang • 2 rumah rusak ringan • 314 rumah terendam
6	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Sumpersari Wai, Sidomukti dan Banjar Agung • Desa Sumberdadi dan Pematang Pasir Kec Ketapang • Desa Gandri Kec Penengahan 	<ul style="list-style-type: none"> • 107 rumah terendam • 124 rumah terendam
7	<ul style="list-style-type: none"> • Desa sumber Agung, Bandar Agung, Kuala Sekampung, dan Sekapura Kecamatan Sragi 	<ul style="list-style-type: none"> • 159 rumah terendam, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan • 40 rumah terendam, 1 rumah rusak berat • 40 rumah terendam dan 1 rumah rusak berat

	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Sumberdadi, Pematang Pasir, Taman Sari Kecamatan Ketapang • Desa Mekar Sari, Karang Sari dan Bali Agung Kecamatan Palas • Desa Tarakan, Rangai Tritunggal, Tanjung Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 rumah terendam dan 1 rusak berat
8	Dusun Kuala jaya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi	345 rumah terdampak, di RT 01,02,03, 04 dan RT 05
9	Desa Banjar Suri Suka Maju, Karang Pucung Pamulihan, Talang Wullan Kec Way Sulan	5 Desa tergenang air
10	Desa Merak BlantungKecamatan Kalianda	13 rumah tergeang lumpur
11	Desa Bangun Rejo, Sidomukti, Kecamatan Ketapang	12 rumah warga tergenag air
12	Desa Suak Kec Kalianda	22 rumah warga rusak dan 1 sekola SD Suak tergenang air

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kab Kalinda, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1, Jumlah Rumah Terendam: Banyak lokasi mengalami dampak besar dengan banyak rumah terendam yaitu di Desa Haji Mena dan Desa Sidosari dengan 883 rumah terendam, serta Dusun Kuala Jaya dengan 345 rumah terdampak. Kerusakan Rumah: Beberapa rumah mengalami kerusakan yang bervariasi, dari rusak ringan hingga rusak berat, dengan beberapa lokasi seperti Desa Sumber Agung dan Bandar Agung melaporkan kerusakan rumah. Fasilitas Umum: Selain rumah, beberapa fasilitas umum seperti Puskesmas juga terendam di beberapa lokasi. Dampak Lain: Selain kerusakan rumah, ada juga dampak lain seperti jembatan putus, sekolah tergenang air, dan desa yang tergenang air.

Data tersebut menunjukkan dampak bencana yang luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena dampak. beberapa poin penting dari dampak banjir tersebut yaitu : Kehilangan Properti dan Kerusakan Rumah. Banyak rumah yang terendam, rusak, atau mengalami kerusakan berat. Contohnya, Desa Haji Mena dan Desa Sidosari mengalami kerusakan yang sangat signifikan dengan 883 rumah terendam, serta beberapa rumah rusak. Hal ini menunjukkan bahwa banyak

keluarga kehilangan tempat tinggal atau menghadapi kerusakan yang memerlukan perbaikan segera.

Dampak pada Fasilitas Umum yaitu Puskesmas di SD Haji Mena SD Suak tergenang air. Ini mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang merupakan kebutuhan dasar.

4.4 Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Menangani Banjir

Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi bencana banjir dan meminimalkan dampaknya. Beberapa peran utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi banjir:

1. Perencanaan dan Pemetaan Risiko

- **Pemetaan Risiko Banjir:** Mengidentifikasi daerah yang paling rentan terhadap banjir dan membuat peta risiko untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi.
- **Perencanaan Tata Ruang:** Menyusun rencana tata ruang yang mempertimbangkan risiko banjir, termasuk larangan pembangunan di zona rawan banjir.

2. Pembangunan Infrastruktur

- **Pembangunan Saluran Drainase:** Membangun dan memelihara saluran drainase yang efektif untuk mengalirkan air hujan ke tempat yang aman.
- **Bendungan dan Penahan Banjir:** Membangun bendungan, tanggul, dan struktur penahan banjir lainnya untuk mengontrol aliran air.
- **Perbaikan Infrastruktur:** Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur yang ada untuk mengurangi kerentanannya terhadap banjir.

3. Pendidikan dan Kesadaran

- Program Edukasi Masyarakat: Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko banjir dan cara-cara mitigasinya.
- Pelatihan dan Simulasi: Mengadakan pelatihan dan simulasi evakuasi untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan bencana.

4. Sistem Peringatan Dini

- Peringatan Banjir: Mengembangkan dan memelihara sistem peringatan dini untuk memberikan informasi yang cukup awal kepada masyarakat tentang potensi banjir.
- Komunikasi Efektif: Menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi peringatan dan panduan evakuasi.

5. Respon dan Penanganan Bencana

- Koordinasi Tim Tanggap Darurat: Membentuk dan melatih tim tanggap darurat yang siap untuk merespons dan mengelola situasi darurat saat banjir terjadi.
- Bantuan Kemanusiaan: Menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan tempat penampungan kepada korban banjir.
- Evakuasi dan Tempat Penampungan: Mengatur evakuasi penduduk dari daerah terdampak dan menyediakan tempat penampungan sementara.

6. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Perbaikan dan Rekonstruksi Infrastruktur: Memfasilitasi perbaikan dan rekonstruksi rumah dan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
- Pendukung Ekonomi: Memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak untuk membantu mereka memulihkan kehidupan mereka.

7. Monitoring dan Evaluasi

- Evaluasi Pasca-Bencana: Menilai dampak banjir dan efektivitas respons untuk meningkatkan perencanaan dan kesiapsiagaan di masa depan.
- Pengumpulan Data: Mengumpulkan data tentang kerusakan dan kebutuhan untuk merencanakan tindakan lebih lanjut.

8. Kolaborasi dan Kemitraan

- Kerja Sama dengan Organisasi: Bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan sumber daya dan upaya penanggulangan.
- Keterlibatan Komunitas: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi serta respons bencana.

Dengan melaksanakan peran-peran tersebut, pemerintah daerah dapat secara efektif mengurangi dampak banjir, melindungi masyarakat, dan mempercepat proses pemulihan setelah bencana.

Secara kelembagaan penanganan Banjir dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah di daerah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Keterbatasan Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Selatan dalam menangani banjir dapat mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya, infrastruktur, koordinasi, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa keterbatasan yang mungkin dihadapi:

1. Sumber Daya Terbatas

- Anggaran: Pemda Lampung Selatan mungkin mengalami keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur anti-banjir, perbaikan kerusakan, dan penyediaan bantuan darurat.
- Tenaga Kerja: Keterbatasan jumlah tenaga kerja terlatih dan profesional dalam manajemen bencana dapat menghambat respons cepat dan efektif terhadap banjir.

2. Infrastruktur yang Tidak Memadai

- Drainase dan Saluran Air: Infrastruktur drainase yang kurang memadai atau tidak terpelihara dengan baik dapat memperburuk situasi banjir. Saluran drainase yang tersumbat atau tidak memadai dapat menyebabkan air hujan tidak mengalir dengan baik.
- Bendungan dan Tanggul: Pembangunan bendungan dan tanggul yang tidak cukup atau rusak dapat meningkatkan risiko banjir. Keterbatasan dalam membangun dan memelihara struktur ini dapat mengurangi efektivitas pengendalian banjir.

3. Keterbatasan dalam Perencanaan dan Pengelolaan

- Perencanaan Tata Ruang: Kurangnya perencanaan tata ruang yang berorientasi pada risiko banjir dapat menyebabkan pembangunan di daerah rawan banjir. Ini membuat banyak rumah dan infrastruktur berada di area yang rentan terhadap banjir.
- Data dan Pemetaan Risiko: Keterbatasan dalam pemetaan risiko banjir dan data yang akurat dapat menghambat perencanaan dan implementasi strategi mitigasi yang efektif.

4. Koordinasi dan Komunikasi

- Koordinasi Antar Lembaga: Tantangan dalam koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat menghambat efektivitas respon terhadap bencana.
- Sistem Peringatan Dini: Keterbatasan dalam sistem peringatan dini dan komunikasi dapat mengakibatkan informasi yang tidak sampai kepada masyarakat tepat waktu, sehingga mengurangi kesiapsiagaan mereka.

5. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

- Kurangnya Edukasi: Kurangnya program edukasi dan kesadaran tentang risiko banjir dan tindakan mitigasi dapat menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi banjir atau tidak mengikuti prosedur evakuasi yang tepat.
- Partisipasi Masyarakat: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan mitigasi dan manajemen bencana dapat mengurangi efektivitas langkah-langkah mitigasi dan respon bencana.

6. Krisis Ekonomi dan Sosial

- Dampak Ekonomi: Kerusakan akibat banjir dapat mempengaruhi ekonomi lokal, mengurangi sumber daya yang tersedia untuk penanggulangan bencana, dan memperlambat pemulihan.
- Kesehatan dan Kesejahteraan: Dampak banjir pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti penyebaran penyakit, dapat memperburuk situasi dan mengalihkan perhatian dari upaya mitigasi.

7. Pengelolaan Bencana

- Tanggap Darurat: Keterbatasan dalam manajemen tanggap darurat, seperti penanganan logistik bantuan, pemulihan dan rehabilitasi, serta pengelolaan krisis, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respons terhadap banjir.

- Kapasitas Manajerial: Keterbatasan dalam kapasitas manajerial dan koordinasi internal di tingkat pemerintah daerah dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan strategi mitigasi bencana yang efektif.

8. Keterbatasan Teknologi

- Teknologi Monitoring dan Peringatan: Keterbatasan dalam teknologi monitoring dan sistem peringatan dini dapat mengurangi kemampuan Pemda untuk memprediksi dan merespons bencana banjir secara efektif.

4.5 Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menangani Banjir

Di sub bab ini akan dibahas kapasitas pemerintah desa dalam mengatasi banjir. Dari data Tabel 1, Desa Haji Mena Kecamatan Natar dijadikan sebagai sampel untuk mengurai masalah banjir di masyarakat dan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi persoalan banjir.

Kenapa di pilih pada level pemerintah desa dalam menangani masalah banjir . Pemilihan level pemerintah desa (Pemdes) dalam menangani masalah banjir sangat penting karena beberapa alasan kunci. Pemerintah desa sering kali menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Tahun 2024, Desa Haji Mena dilanda banjir dua kali dalam setahun (lihat data pada Tabel 1). Banjir di Desa Haji Mena mulai terjadi sejak tahun 2022, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya desa ini tidak pernah mengalami bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, serta beberapa warga yang terdampak banjir, terdapat beberapa penyebab utama terjadinya banjir, yaitu:

1. Curah hujan yang sangat tinggi dan berlangsung cukup lama.

2. Penyempitan sungai akibat pembangunan rumah-rumah penduduk di daerah pinggiran sungai.
3. Banyak warga yang membuang sampah ke sungai saat musim hujan, yang hingga saat ini tidak terkontrol dan tidak ada petugas khusus yang mengawasi penertiban pembuangan sampah ke sungai.
4. Jumlah pemukiman di daerah Desa Haji Mena terus meningkat setiap tahun.
5. Tidak adanya sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi sebelum terjadinya banjir.

Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Haji Mena mengalami peningkatan frekuensi bencana banjir, dengan dua kejadian dalam setahun 2024 setelah mengalami banjir pertama kali pada tahun 2022. Ini menandakan adanya perubahan signifikan dalam pola banjir di desa tersebut, yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah serupa.

Interpretasi dari data ini menunjukkan beberapa faktor penyebab utama banjir yang perlu ditangani untuk mengurangi dampaknya di masa depan:

1. Curah Hujan Tinggi dan Berkepanjangan: Peningkatan curah hujan yang ekstrem dan berkepanjangan menjadi faktor utama. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan iklim atau pola cuaca yang semakin intens, yang memerlukan strategi mitigasi untuk menghadapi curah hujan yang tinggi.
2. Penyempitan Sungai: Pembangunan rumah-rumah di sepanjang pinggiran sungai telah mengurangi kapasitas aliran sungai. Penyempitan ini menghambat aliran air dan memperburuk banjir. Ini menunjukkan perlunya perencanaan tata ruang yang

lebih baik dan penegakan aturan pembangunan yang mempertimbangkan dampak terhadap aliran sungai.

3. Pembuangan Sampah ke Sungai: Banyak warga yang membuang sampah ke sungai saat musim hujan, yang mengakibatkan penyumbatan aliran dan memperburuk banjir. Tidak adanya pengawasan dan penertiban dalam pembuangan sampah memperburuk situasi. Diperlukan tindakan pembersihan sungai secara berkala dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai.
4. Peningkatan Jumlah Pemukiman: Pertumbuhan jumlah pemukiman setiap tahun meningkatkan risiko banjir, terutama jika pembangunan tidak disertai dengan infrastruktur yang memadai untuk menangani air hujan. Pengelolaan pemukiman yang berkelanjutan dan integrasi dengan sistem drainase yang efektif adalah kunci untuk mengatasi masalah ini.
5. Ketiadaan Sistem Peringatan Dini: Tidak adanya sistem peringatan dini berarti warga tidak memiliki informasi sebelumnya tentang potensi banjir, yang memperparah dampak bencana. Implementasi sistem peringatan dini dapat memberikan informasi yang cukup agar masyarakat dapat mengambil langkah-langkah pencegahan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Lampung Selatan memerlukan pendekatan multifaset, termasuk perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak banjir di masa depan.

Jika ditelaah dari aspek model pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan saat ini dengan mengambil kasus penanganan banjir bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Model Pemerintahan Dalam Menangani Banjir di Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut

No	Karakteristik	Penjelasan
1	Kelembagaan Pemerintah	Dijalankan oleh BPBD Kabupaten Lampung Selatan, ; Struktur kelembagaan yang ada tidak fleksible
2	Kewenangan	Tidak ada kewenangan yang didelegasikan ke Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penanganan banjir
3	Reaktif	Pemerintah masih bersifat reaktif dalam menghadapi banjir, dengan respons yang kurang cepat dan antisipatif.
4	Tidak adaptive	Pemerintah kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di masyarakat
5	Inovasi sosial	Inovasi sosial, seperti gerakan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, masih kurang digalakkan.
6	Pengawasan	Pengawasan untuk mencegah terjadinya banjir masih sangat lemah dan kurang efektif.
7	Perang Pemerintah Desa	Pemerintah desa hanya berperan dalam menampung aspirasi masyarakat dan melaporkannya kepada pemerintah kabupaten dan BPBD
8	Desa Tangguh Bencana	Konsep desa tangguh bencana belum diterapkan secara merata di seluruh desa dan belum efektif.

Sumber : Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 2 model pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Selatan belum dikategorikan sebagai pemerintahan yang fleksibel dan adaptif. Pemerintah Kabupaten Lamsel masih reaktif , antisipasi terhadap penangananan banjir belum dilakukan, pengawasan dan inovasi soaial belum dilakukan dalam mengatasi masalah banjir. Selain itu, Delegasi kewenangan yang terbatas kepada tingkat lokal, seperti

Kecamatan dan Desa, juga mengurangi efektivitas penanganan. Program seperti Desa Tangguh Bencana belum diterapkan secara merata dan efektif, yang mengindikasikan adanya kebutuhan untuk reformasi dan peningkatan kapasitas dalam manajemen bencana di daerah tersebut.

Model pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Selatan masih menunjukkan kekurangan signifikan dibandingkan dengan model antisipatif dan adaptif. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif dengan meningkatkan strategi antisipatif, memperkuat pengawasan, menggalakkan inovasi sosial, serta mendelgasikan kewenangan lebih banyak kepada tingkat lokal untuk meningkatkan efektivitas penanganan banjir. Implementasi program seperti Desa Tangguh Bencana secara merata dan efektif juga perlu diperhatikan untuk membangun ketahanan bencana di seluruh wilayah. Reformasi dan peningkatan kapasitas dalam manajemen bencana sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan banjir dengan lebih baik di masa depan.

4.6 Analisis Banjir dan Kelembagaan Pemerintah

Banjir di Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya disebabkan akibat curah hujan yang sangat tinggi, menyebabkan sungai-sungai meluap, terjadi penyempitan sungai dan sistem drainase yang tidak memadai banjir menjadi semakin parah. Ribuan rumah terendam, dan akses ke beberapa daerah terputus. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah dan harta benda mereka yang terendam banjir.

Para ahli dan pengamat mencoba mencari sebab kenapa banjir dari tahun ketahun bukannya menjadi lebih terkendali, tapi justru semakin parah. Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memperburuk kondisi

banjir, yaitu perubahan iklim, deforestasi, urbanisasi tanpa perencanaan yang baik, dan sistem drainase yang buruk

Selain itu, perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan lebat, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan risiko dan dampak banjir. Peningkatan suhu global menyebabkan lebih banyak uap air di atmosfer, yang kemudian dapat menyebabkan hujan lebih deras.

Deforestasi atau merubah kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, terutama di daerah hulu sungai, juga memperburuk kondisi banjir. Pohon dan vegetasi lain berperan penting dalam menyerap air hujan dan mengisinya kembali ke dalam tanah. Ketika pohon ditebangi, kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang, menyebabkan lebih banyak aliran permukaan yang dapat menyebabkan erosi dan meningkatkan risiko banjir di daerah hilir.

Urbanisasi yang cepat dan tidak terkontrol menyebabkan bertambahnya permukaan yang tidak dapat menyerap air, seperti aspal dan beton, yang mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah dan meningkatkan aliran permukaan. Hal ini, bersama dengan sistem drainase kota yang seringkali tidak memadai atau kurang terawat, menyebabkan kota-kota menjadi sangat rentan terhadap banjir, bahkan dari hujan yang tidak terlalu ekstrem/

Selain itu, sistem drainase yang buruk atau tidak memadai di banyak daerah juga berkontribusi pada masalah banjir. Drainase yang tersumbat atau tidak dirancang untuk menangani volume air yang meningkat dapat dengan mudah meluap, menyebabkan banjir di daerah sekitarnya.

Untuk mengatasi masalah banjir secara teknis pengetahuan dan pemahaman penyebab banjir sudah diketahui masyarakat awam, masyarakat terdidik, para ahli,

bahkan para pembuat kebijakan di daerah pun seperti anggota Dewan dan Kepala Daerah. Lalu, upaya solutif, seperti mitigasi perubahan iklim, reboisasi dan pengelolaan hutan sudah direkomendasikan dalam berbagai alternatif kebijakan namun solusi alternatif itu tidak belum bisa mengatasi banjir secara efektif, bahkan dari tahun-ketahun banjir semakin dahsyat. Apa sejatinya inti permasalahan utama penyebab banjir?

Salah satu persoalan penyebab banjir yang sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan yaitu faktor kepentingan ekonomi politik yang sulit dihindari karena atas nama kepentingan untuk mengakumulasi modal, sumber daya alam, ruang terbuka hijau, hutan kota, dst harus dikorbankan. Dalam kerangka logika ekonomi politik, fenomena banjir, kepentingan ekonomi menjadi dominan dalam mengeksploitasi pengelolaan sumber daya alam; dan faktor penguasa di daerah tidak memiliki alternatif lain dalam meningkatkan pendapatan keuangan daerah sehingga mempengaruhi kebijakan publik.

Jadi dalam perspektif demikian, kepentingan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah begitu mudah memberi perizinan untuk kepentingan investor dengan mengorbankan lahan untuk pembangunan perumahan, pusat-pusat perdagangan, pembangunan pasar moder, dst

Berbagai area untuk kepentingan investor tersebut tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan beberapa contoh bagaimana kepentingan ekonomi dapat berkontribusi terhadap frekuensi dan intensitas banjir.

Dalam konteks ini, logika ekonomi politik mengungkap bagaimana keputusan yang menguntungkan secara ekonomi jangka pendek seringkali diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dinamika kekuasaan politik juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sumber daya alam dikelola dan bagaimana kebijakan publik dibentuk. Aktor-aktor politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, memiliki kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain, sehingga kebijakan yang diambil tidak selalu mencerminkan kepentingan publik atau keberlanjutan lingkungan. Misalnya, tekanan dari kelompok kepentingan tertentu dapat mengarah pada kebijakan yang memperbolehkan pembangunan di daerah resapan air atau pengabaian regulasi lingkungan untuk menarik investasi.

Dalam konteks logika ekonomi politik, banjir yang semakin sering terjadi dengan dampak yang lebih luas dan merusak menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek teknis pengelolaan banjir, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomi, politik, dan sosial yang berkontribusi terhadap masalah tersebut..

Di beberapa tempat di Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya dalam dua bulan terakhir ini dilanda banjir yang tidak bisa dikendalikan. Banjir tersebut mengakibatkan kerugian material yang signifikan dan mengganggu aktivitas sehari-hari penduduk. Selain itu, banjir juga menyebabkan beberapa infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan, yang menambah kesulitan dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan. Sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan yang terus meningkat setiap tahunnya, memerlukan solusi jangka panjang yang efektif dan berkelanjutan.

Bagaimana mengatasi banjir dan tanggung jawab siapa? Banjir, terutama yang terjadi di area pemukiman penduduk dan dekat dengan sungai, akan terus menjadi

ancaman jika tidak diambil tindakan yang komprehensif dan koordinatif. Mengatasi banjir merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dalam banyak kasus, peran masyarakat sangat proaktif ketika banjir terjadi. Mereka saling membantu dalam mengatasi banjir dan pasca banjir, menggiatkan gotong royong, menyediakan bantuan makanan, pakaian, serta membersihkan halaman dan rumah dengan penuh keikhlasan. Namun, bagaimana dengan peran swasta dan pemerintah?

Peran sektor swasta sering kali terbatas dalam mengatasi banjir, padahal mereka dapat berkontribusi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mendukung proyek-proyek infrastruktur hijau atau dengan inovasi teknologi yang mendukung penanggulangan banjir.

Sementara itu, peran pemerintah, meskipun dengan segala keterbatasannya, cenderung reaktif dan sering kali terlambat serta tidak bersikap antisipatif. Tindakan yang diambil biasanya baru dimulai setelah banjir terjadi, fokus pada mitigasi dampak daripada pencegahan.

Upaya mengatasi banjir seringkali dilakukan secara terbatas, dengan beban terbesar ditanggung oleh masyarakat. Membangun pemerintahan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai institusi atau lembaga belum diupayakan sebagai sebuah model dalam pemecahan masalah publik. Padahal, dengan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat, upaya pengurangan risiko banjir dapat lebih efektif dan dapat mengurangi dampak buruk pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir.

Akhirnya, setiap kali banjir terjadi, masyarakat dan pemerintah sering kali bersikap pasrah, bersikap masa bodoh, melakukan tindakan pencegahan sementara, dan hanya berharap tidak terjadi hujan lebat lagi dan menunggu musim panas tiba.

Peran Desa dalam Merespons Banjir?

Pemerintah yang bertanggung jawab dan pemegang peran utama dalam penyelesaian masalah publik, termasuk di dalamnya masalah banjir, maka dalam perpektif ini banjir adalah tanggung jawab pemerintah. Artinya, pemerintah menjadi faktor determinan untuk penyelesaian banjir.

Persoalannya pemerintah mana? Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan/Desa? Parameternya selalu diukur dari aspek legalitas formal, yaitu mengatasi banjir berdasarkan kewenangan formal pemerintahan. Dalam cara pandang ini kendati banjir melanda di wilayah kelurahan / desa terdekat, sepanjang itu bukan kewenangan pemerintah kelurahan/desa maka banjir tidak akan tidak akan diselesaikan oleh pemerintah keluruhan/desa.

Cara pandang legalistik ini, seringkali antar pemerintah saling lepar tanggung jawab, ini tanggung jawab pemerintah Provinsi, atau ini tanggung jawab pemerintah Kota? jadi dasarnya melihat kewenangan siapa?

Secara kelembagaan dan teknis dengan adanya [UU No.24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana, di sebutkan dalam Pasal 5 bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Untuk mewujudkan hal tersebut di bentuk pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana.

Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana).

Kendati secara kelembagaan sudah dibentuk Destana tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola bencana. Permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan anggaran, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas Destana melalui pelatihan, pendanaan yang memadai, dan kampanye kesadaran bencana yang lebih luas agar Destana dapat berfungsi optimal sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana di tingkat komunitas.

Dari analisis yang dijelaskan untuk mengatasi masalah banjir perlu ada perubahan model pemerintahan dari model yang birokratik, hirarkis, terikat dengan aturan formal yang kaku ke model pemerintahan yang antisipatif, adaktif, ada penyerahan urusan pemerintahan ke pemerintahan desa dan inovasi social (lihat table 3)

Tabel 3 Model Pemerintahan

No	Karakteristik Pemerintahan	Kelembagaan
1	Antisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki perencanaan jangka panjang untuk mengantisipasi terjadinya banjir • Pemetaan Risiko: Ada upaya aktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah . Ini termasuk pengembangan sistem peringatan dini dan mekanisme mitigasi risiko. • Pengumpulan Data dan Informasi: Pemerintah antisipatif mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi secara sistematis untuk memahami tren, pola, dan potensi masalah yang mungkin timbul. • Kebijakan Fleksibel: Kebijakan yang diadopsi memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan berdasarkan perubahan kondisi dan temuan terbaru, memastikan bahwa respon pemerintah tetap relevan dengan situasi yang berkembang. • Kolaborasi dan Kemitraan: Pemerintah antisipatif cenderung bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih efektif.

2	Adaptif	Dalam konteks penanganan banjir pemerintahan adaptif dilihat adanya pengambilan keputusan yang fleksibel dan responsif terhadap penanganan banjir
3	Penyerahan Urusan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan urusan dalam mengatasi banjir ke pemerintah desa melibatkan berbagai aspek pengelolaan dan respons yang dapat dilakukan di tingkat desa. antara lain , Pengaturan Proses Evakuasi: Menyusun dan melaksanakan rencana evakuasi untuk warga yang terdampak banjir, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara. □ Tim Tanggap Darurat: Membentuk dan melatih tim tanggap darurat di tingkat desa untuk merespons bencana banjir dengan cepat dan efektif.
4	Inovasi Sosial	Masalah banjir bukan hanya sebatas tanggung jawab pemerintah tetapi juga harus menjadi urusan bersama. Jadi, diperlukan inovasi sosial

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil riset dan pembahasan, simpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Banjir yang terjadi sekarang ini khususnya dalam studi pemerintahan merupakan persoalan ketidakpastian yang harus ditangani bukan dari aspek teknis semata tetapi bagaimana memposisikan peran pemerintah daerah bisa antisipatif dan adaptif dengan perubahan lingkungan yang penuh ketidakpastian.
2. Hasil temuan riset menunjukkan, bahwa cara kerja pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menangani persoalan banjir belum beradaptasi dengan persoalan di masyarakat dan perubahan lingkungan yang terjadi. Secara kelembagaan masalah banjir masih terpusat di tangan pemerintah kabupaten yang secara teknis dilakukan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), lembaga ini akses untuk menangani banjir terlalu luas karena harus mengatasi banjir di wilayah Kabupaten , sementara lokasinya berjauhan dengan BPBD, sementara penanganan banjir memerlukan penanggulangan yang cepat dan antisipatif.
3. Posisi Desa sebagai lembaga pemerintahan yang paling bawah, dari aspek kewenangan untuk mengatasi persoalan banjir. Peran kepala desa dalam mengenai banjir, hanya sebatas melaporkan kejadian banjir, menampung berbagai aspirasi warga yang terkena banjir, dan mendiskusikan dengan warga jalan keluar dalam mengatasi persoalan banjir, membantu mengevakuasi banjir.

4. Problem mendasar penyebab banjir yaitu ada penyempitan sungai, berkembangnya pemukiman baru, warga masih banyak membuang sampah ke sungai dan tidak bisa diawasi, dan curah hujan yang sangat tinggi,
5. Upaya untuk mengatasi banjir, peran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan masih sangat terbatas antara lain disebabkan karena faktor anggaran yang terbatas, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tata guna lahan. Selain itu, infrastruktur drainase yang belum memadai dan dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem turut memperburuk situasi, sehingga menghambat implementasi solusi yang efektif untuk menangani banjir secara menyeluruh.
6. Secara keseluruhan dengan menelaah kasus banjir , model pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan belum bisa dikategorikan memiliki kapasitas yang kuat dalam mengatasi persoalan ketidakpastian seperti banjir. Hal tersebut bisa dilihat dari cara kerja kelembagaan pemerintahan yang cenderung reaktif dan tidak adanya pendelegasian kewenangan pada pemerintahan yang paling bawah. Dengan kata lain, model pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan tidak dikategorikan sebagai pemerintahan yang antisipatif, adaptif. Lemah dalam melakukan inovasi sosial dan kewenangan yang masih terpusat di Kabupaten.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini menelaah persoalan banjir dilihat dari efektivitas model pemerintahan. Hasil riset menyimpulkan bahwa model pemerintahan yang cenderung reaktif, masih hirarkis, birokratik, tidak ada penyerahan urusan ke pemerintahan desa, dan tidak ada inovasi sosial tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan ketidakpastian seperti banjir atau bencana lainnya. Oleh karena itu ke depan secara bertahap harus dilakukan

pengembangan pemerintah yang lebih responsif, antisipatif, adaptif, optimalisasi pemerintah desa dan melakukan inovasi sosial dalam mengatasi persoalan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Boon Siong Neo, Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
- Moeleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Naoetion, S., 1988. *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse, City hall to Pentagon*. Reading, MA: Addison Wesley
- Pratikno. 2007. "Governance dan Krisis Teori Organisasi" *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*", November 2007, Vol. 12, No. 2, Yogyakarta: MAP UGM. Melalui <http://www.Pratikno.ugm.ac.id/jurnal> governance, [16 Maret 2010].
- Raadschelders, Jos C.N. 2003. *Government A Public Administration Perspective*. M.E. Sharpe Inc, London, England. Armonk, New York.
- Rhodes, R.A.W. 1996. "The Governance : Governing Without Government", *Jurnal Political Studies*, Blackwell Publishers, Cambridge.
- , 1997. "Understanding Governance : Policy Network, Reflexivity and Accountability", Buckingham : Open University Press.
- , 2007. "Understansing Governance : Ten Years on", *Jurnal Organisation Studies 28 (08)*, Sage Publication, London, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Boon Siong Neo, Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
- Moeleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Naoetion, S., 1988. *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse, City hall to Pentagon*. Reading, MA: Addison Wesley
- Pratikno. 2007. "Governance dan Krisis Teori Organisasi" *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*", November 2007, Vol. 12, No. 2, Yogyakarta: MAP UGM. Melalui <http://www.Pratikno.ugm.ac.id/jurnal> governance, [16 Maret 2010].
- Raadschelders, Jos C.N. 2003. *Government A Public Administration Perspective*. M.E. Sharpe Inc, London, England. Armonk, New York.
- Rhodes, R.A.W. 1996. "The Governance : Governing Without Government", *Jurnal Political Studies*, Blackwell Publishers, Cambridge.
- , 1997. "Understanding Governance : Policy Network, Reflexivity and Accountability", Buckingham : Open University Press.
- , 2007. "Understansing Governance : Ten Years on", *Jurnal Organisation Studies* 28 (08), Sage Publication, London, 2007.